

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Bajuri, Jurnal Bisnis & Ekonomi, Vol.18.no 01
- Benny K. Harman, 2012, Negeri Mafia Republik Koruptor “Menggugat Peran DPR Reformasi”, Lamalera, Yogyakarta, hlm. 359
- Bibit S. Rianto, 2009, Korupsi Go To Hell, Mizan Publica, Bandung, hlm. 73
- Damanik, Sariman, Kedudukan Dan Kewenangan KPK Dalam Struktur Ketatanegaraan Republic Indonesia. UIN Suska Riau, 2020
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Naskah Akademik Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, DPR RI, hlm. 58
- Dewan Perwakilan Rakyat Ri, Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Selasa 9 Februari 2016
- Erlangga Pratama, JurnalIntelijen.net. desember 2019. diakses oktober 2020
- Fat, “Belajar dari KegagalanTGPTPK”, (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3295/belajar-dari-kegagalan-tgptpk?>, Diakses pada 9 Mei 2020, 2001)
- Fernando M. Manullang, 2007 : 95.
- Gunawan A. Tauda, 2012, Komisi Negara Independen, Genta Press, Yogyakarta, hlm. 8
- Hasil kajian wewenang penyidik dalam UU no 30 Tahun 2002. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang perubahan kedua atas UU No 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantas tindak pidana korupsi
- Hasil Wawancara bersama Albertina Ho Pada Tanggal 30 Juni 2020 Pukul 13:30 WITA
- Hario Dhanang Pambudhi, “*Tinjauan Ketatanegaraan Dewan Pengawas KPK*”, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, <http://fh.unpad.ac.id/tinjauan-ketatanegaraan-dewan-pengawas-kpk/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020.
- Haryanti Puspa Sari, “Penjelasan Dewas KPK Soal Izin Penyadapan, Penggeledahan hingga Evaluasi Pimpinan”(nasional.kompas.com/read/2020/01/28/07260631/penjelasan-dewas-

kpksoal-izin-penyadapan-penggeledahan-hingga-evaluasi?page=all, Diakses pada 17 Juni 2020, 2020)

Haris Prabowo.. *Jokowi Setujui SP3 Kasus Korupsi dan Dewan Pengawas di Revisi UU KPK 2019*

Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241

Indrianto Seno Adji, Denny Indrayana, Arif Setiawan, Bambang Widjojanto, Nur Sholikin, *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang Undang Tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Indonesia Corruption watch Jl. Kalibata Timur IV D No 6 Jakarta Selatan 2016*, 16.

Jimly Asshiddiqie “Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi” (Jakarta : Sekertariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).43

Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm 35

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Lon Fuller, bukunya *the Morality of Law 1971* : 54-58

M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV.Mandar Maju,, 2014), hlm. 80.

Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Mahmuddin Muslimin, 2004, *Jalan Panjang Menuju KPTPK, Gerak*, Jakarta, hlmTitik Triwulan tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenadamedia Group, Jakarta

Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

- Muzakkir DKK, 2011, Laporan Akhir Tim Kompedium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi,
- Oktavia Wulandari halu oleo legal research Volume 2 Issue 3, December 2020: pp. 172-186.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Preneda Media Group, h.178
- Sekilas KPK, di unduhlm. dari <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>
- Sirajuddin dan Winardi, 2015, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang, hlm. 206 59 Ibid. hlm. 207
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006
- Surahman Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, Edisi VII, Cetakan IV, Tarsito
- Sudiman Sidabukke, “Tinjauan Kewenangan Penyadapan Oleh KPK Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Universitas Surabaya, 2019
- Tjoneng, Arman. Volume 2. No 2. Jurnal Esensi Hukum UPN. Desember 2020
- Undang-Undang Dasar 1945, Sekeretaris Jenderal MPR RI, 2011 H. 123
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Zunita Putri. *Bamsoet Targetkan Revisi UU KPK Disahkan DPRPeriode 2014-2019*.